



Mulai Kurangi Ketergantungan terhadap Produk Luar Negeri

JOGJA - Pemkot Jogja mulai mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan produk luar negeri. Khususnya untuk pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut dilakukan agar para pengusaha lokal bisa lebih sejahtera.

Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan mengatakan, persentase penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkot Jogja pada 2024 sudah mencapai 94,1 persen.

Angka itu naik dibanding tahun 2022. Persentase penggunaan produk lokal menyentuh angka 84,1 persen.

Dia menyampaikan, penggunaan produk lokal untuk pengadaan barang dan jasa di Pemkot Jogja juga sudah disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022. Kebijakan tersebut mengatur tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemkot Jogja diketahui sudah melampaui arahan



RADAR JOGJA

WAWAN HARMAWAN

dari Inpres tersebut. Sebab alokasi minimal penggunaan produk dalam negeri wajib 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa. Menurut Wawan, hal tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemkot untuk mengurangi ketergantungan produk impor.

Hingga sekarang, baru PT Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) yang menggunakan hampir 100 persen komponen dalam negeri. Pemkot pun terus berupaya memfasilitasi industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Supaya pengusaha kecil dapat masuk dalam rantai pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung per-

tumbuhan ekonomi lokal," ujar Wawan di sela kegiatan Business Matching yang diselenggarakan di Taman Budaya Embung Giwangan, Selasa (24/6).

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogja Tri Karyadi Riyanto Raharjo menyatakan, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Jogja memang masih menggunakan produk impor. Misalnya alat kesehatan. Serta peralatan teknologi tinggi untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, serta RSUD Kota Jogja.

Menurut Totok, sapaannya, masih digunakannya produk luar negeri untuk beberapa OPD tersebut karena minimnya ketersediaan produk dalam negeri. Serta ada beberapa spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi, namun itu belum bisa didapat dari produsen lokal.

"OPD wajib menggunakan produk lokal terlebih dahulu. Jika hendak menggunakan produk impor, harus melalui mekanisme ketat dan mendapat izin langsung dari wali kota," bebernya. (inu/zam/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005